



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku Liwa
Telp. (0728) 21106 Fax. (0728) 21106
Laman: lampungbaratkab.go.id Pos-el: bkadlampungbarat@gmail.com

Liwa, 11 Februari 2026

Nomor : 900/71 / IV.01 / 2026
Sifat : Terbuka
Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2025

Yth. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat
Di-
Tempat

Menindaklanjuti Lampiran II Surat Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Barat Nomor : 060/22/09/2026 tanggal 12 Januari 2026 Perihal Permintaan Data Admin Pengelola SKM, Penyusunan LKjIP, Penyampaian Realisasi RB Triwulan IV 2025, serta Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Perangkat Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.


**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**
SUMADI, S.IP., M.M.
NIP. 19760607 199903 1007
IV b / PEMBINA TINGKAT I

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, BKAD Kabupaten Lampung Barat telah memiliki dokumen perencanaan jangka menengah sebagai kerangka acuan kerja, yang kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan, dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja BKAD Kabupaten Lampung Barat ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan BKAD Kabupaten Lampung Barat dalam rangka membantu mewujudkan Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sekaligus mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan perangkat daerah dalam mengemban tugas dan mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan.

Laporan Kinerja BKAD Kabupaten Lampung Barat ini disusun dengan memperhatikan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026.

Demikianlah pengantar kami, semoga dokumen ini dapat bermanfaat.

Liwa, 11 Februari 2026
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

SUMADI, S.IP., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760607 199903 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia, setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, Rencana Strategis BKAD Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja BKAD Tahun 2025, Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKAD Tahun 2025.

LKjIP ini memberikan gambaran tingkat pencapaian Sasaran maupun Tujuan Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari Tujuan, Sasaran, dan Strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban BKAD Kabupaten Lampung Barat atas penyelenggaraan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025, yang dapat menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. LKjIP ini disusun dengan menyajikan hasil Pengukuran Kinerja yang merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat terpecah menjadi 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Barat. Dengan terbentuknya BKAD Kabupaten Lampung Barat, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kabupaten Lampung

Barat Tahun 2024-2026, sebagai pedoman perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahun 2024-2026.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BKAD Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai dengan tugas yang diembannya dan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah, maka BKAD Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 memiliki 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) Sasaran Strategis serta 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan dan Sasaran tersebut untuk Tahun 2024-2026 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP

BKAD Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Analisis Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
Terhadap Tahun Sebelumnya dan Terhadap Target Akhir Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		%	Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi			
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Sebagaimana terlihat pada Tabel di atas, BKAD Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025 dengan baik. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (Renstra), maka terlihat bahwa pada Tahun 2025 target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Capaian kinerja indikator sasaran sebagaimana ditampilkan pada Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator 1 "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" dengan target WTP dapat terealisasi (100%). Kabupaten Lampung Barat dapat mencapai target berupa Opini WTP atas LKPD Tahun 2024 pada Triwulan II 2025. Hal ini berarti indikator ini sudah optimal memenuhi target kinerja, sehingga untuk tahun berikutnya tetap dilakukan upaya-upaya sebagaimana telah dilakukan selama ini, namun akan terus dilakukan evaluasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang mendukung indikator ini, mengingat tantangan untuk terus mempertahankan Opini WTP akan semakin berat, karena aturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis, dan standar penilaian atas LPKD dari Auditor yang semakin sulit.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 merupakan hasil kontribusi, dukungan dan kerja sama berbagai pihak di lingkungan internal BKAD Kabupaten Lampung Barat serta seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Lampung Barat, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi.

Liwa, 11 Februari 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



SUMADI, S.IP., M.M.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 16760607 199903 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Tugas dan Fungsi	I - 2
1.3 Struktur Organisasi	I - 4
1.4 Peran Strategis Perangkat Daerah.....	I - 4
1.5 Isu Strategis Perangkat Daerah	I - 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II - 1
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	II - 1
a. Strategi dan Arah Kebijakan	II - 1
b. Program dan Kegiatan Pembangunan	II - 3
2.2 Indikator Kinerja Utama	II - 3
2.3 Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	II - 5
2.4 Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra.....	II - 8
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	III - 1
3.1 Analisis Sumber Daya Manusia.....	III - 1
3.2 Analisis Sarana dan Prasarana	III - 2
3.3 Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2023	III - 3
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA.....	IV - 1
4.1 Capaian Kinerja.....	IV - 2
4.2 Perbandingan Kinerja	IV - 6
a. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	IV - 6
b. Perbandingan Kinerja dengan Pemerintah Tingkat Provinsi ..	IV - 7
c. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis.....	IV - 8
4.3 Realisasi Anggaran.....	IV - 13
4.4 Inovasi dan Prestasi yang Diraih Perangkat Daerah	IV - 17
BAB V PENUTUP	V - 1
5.1 Simpulan Umum	V - 1
5.2 Faktor Pendukung Keberhasilan	V - 2
5.3 Permasalahan	V - 3
5.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	V - 4

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	II - 2
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama.....	II - 4
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja	II - 5
Tabel 2.4. Kerangka Pendanaan	II - 6
Tabel 2.5. Target Kinerja.....	II - 8
Tabel 3.1. DPA Perubahan BKAD Kabupaten Lampung Barat TA. 2025.....	III - 4
Tabel 4.1. Skala Predikat Capaian Kinerja Pendekatan Permendagri No. 86....	IV - 2
Tabel 4.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	IV - 3
Tabel 4.3. Evaluasi Pencapaian Sasaran	IV - 6
Tabel 4.4. Perbandingan Kinerja Nyata dengan Pemerintah Tingkat Provinsi...	IV - 7
Tabel 4.5. Capaian Sasaran Strategis	IV - 8
Tabel 4.6. Data Dukung Capaian Indikator Sasaran 1	IV - 11
Tabel 4.7. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 terhadap Tahun 2024	IV - 11
Tabel 4.8. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 terhadap Target Renstra.....	IV - 12
Tabel 4.9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	IV - 16

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi BKAD	I - 4
Gambar 4.1. Peta Proses Bisnis Kegiatan Utama BKAD.....	IV - 5
Gambar 4.2. Target dan Realisasi IKU	IV - 6
Gambar 4.3. Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra	IV - 13
Gambar 4.4. Kebutuhan Pegawai	IV - 15
Gambar 4.5. Perbandingan Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran	IV - 16
Gambar 4.6. Bupati Lampung Barat Menerima Penghargaan Opini WTP	IV - 18



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi perangkat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian Tujuan dan Sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi daerah, melainkan keselarasan dengan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak



Pidana Korupsi, dan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja serta lebih jauh pencapaian Tujuan, Sasaran, dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama, terhadap target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas, fungsi dan rincian tugas BKAD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Tugas BKAD adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, BKAD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



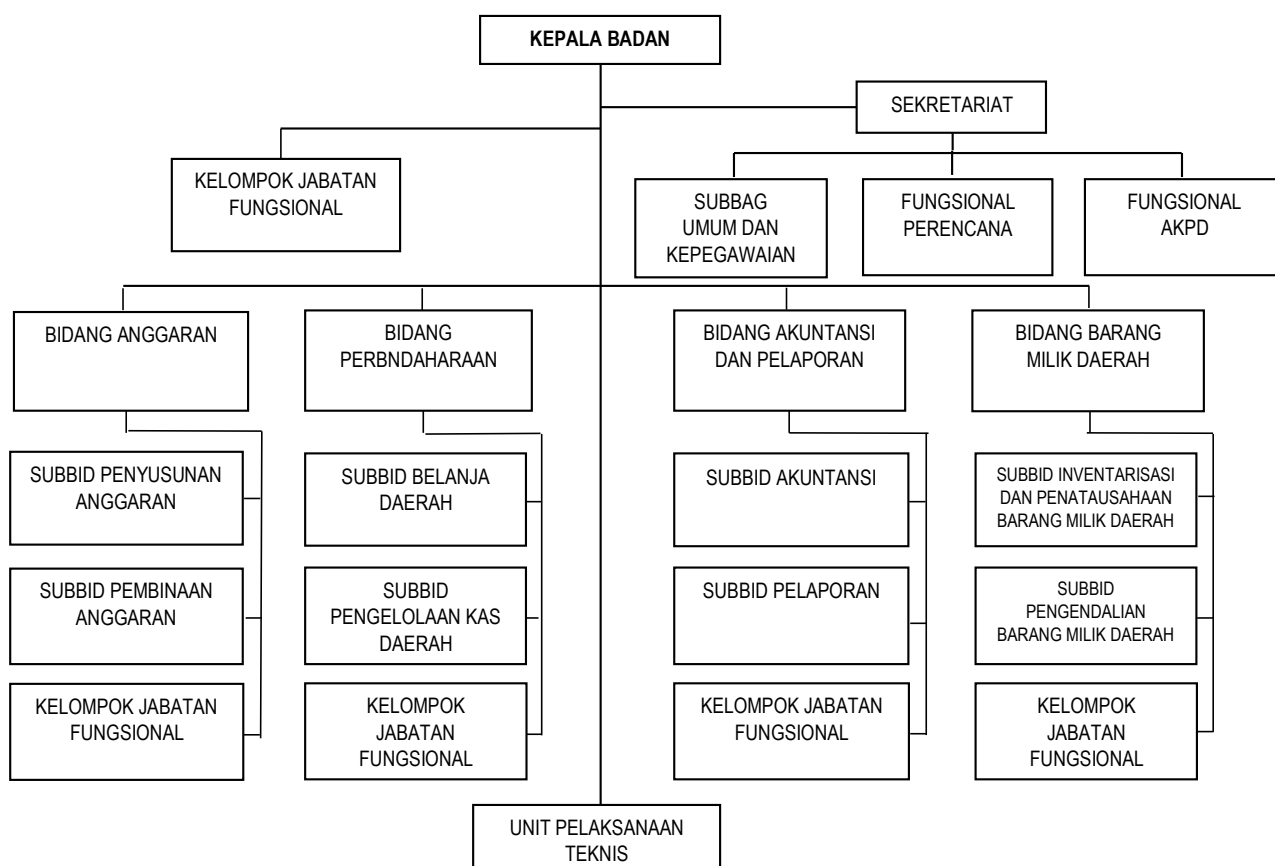
c. Rincian Tugas

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, BKAD mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- 2) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang keuangan dan aset daerah;
- 3) Merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan aset daerah;
- 4) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5) Membuat dan menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 6) Melaksanakan pengelolaan aset daerah dalam rangka meningkatkan kekayaan daerah;
- 7) Membagi tugas atau kegiatan pada bawahan sekaligus memberi petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- 9) Menilai prestasi kerja PNS di lingkup Badan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- 10) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Lampung Barat

1.4 Peran Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, BKAD Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Keuangan.



BKAD Kabupaten Lampung Barat memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah. Tugas tersebut bersifat pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang berkaitan dengan penyusunan APBD dan APBDP, penerbitan SP2D, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (termasuk LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CALK), dan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk kelimabelas kalinya secara berturut-turut memperoleh penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 Berbasis Akrua, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Penghargaan Opini WTP tersebut telah diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2011.

1.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya serta penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan, Badan Keuangan dan Aset Daerah dihadapkan pada isu strategis yang membutuhkan pemecahan.

Adapun isu strategis yang dihadapi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan keuangan daerah yang dinamis.

Kabupaten Lampung Barat selama lebih dari 10 tahun berturut-turut meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Akan tetapi dengan pencapaian tersebut, semakin sulit untuk mempertahankan Opini WTP, karena Auditor BPK dan Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik) terus meningkatkan standar penilaian.

Selain itu, regulasi di bidang pengelolaan keuangan sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan APBD yang telah berjalan.

- b. Pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis sistem informasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat ini, pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal.

Penyebab :

1. Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi.
 2. Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah.
 3. Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD.
 4. Regulasi di bidang pengelolaan aset sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan Standar Satuan Harga yang mempengaruhi penyusunan APBD.
- c. Potensi penurunan Pendapatan Daerah akibat penurunan target PAD dan pengurangan Dana Transfer ke daerah sebagai dampak kondisi *force majeure* yang tidak dapat diprediksi ke depannya, seperti pandemi penyakit dan bencana alam.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan daerah, agar memiliki arah yang jelas, terarah, dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah dengan terbentuknya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat, setelah sebelumnya terdapat dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14), yang sekaligus menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, termasuk Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

a. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan daerah di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang diampu oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah *“Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan”*.



Selanjutnya, Sasaran daerah yang akan dicapai adalah *“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan”*.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran daerah di dalam RPD tersebut, Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah *“Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat”*.

Selanjutnya, Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah *“Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah”*.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran tersebut, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024-2026

TUJUAN RPD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan			
SASARAN RPD: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	1. Melaksanakan penganggaran APBD yang tepat waktu	1. Peningkatan kualitas penganggaran APBD
		2. Melaksanakan manajemen/ pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien	2. Peningkatan kualitas manajemen/pengelolaan kas daerah
		3. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	3. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		4. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan	4. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah



b. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum di dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 10) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 11) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 12) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 13) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan :
 - 14) Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, diterbitkanlah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi



Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/03.b/KPTS/IV.01/2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET			DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	Hasil evaluasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung	BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung	WTP	WTP	WTP	Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu lembaga/organisasi, yang didasarkan pada 4 kriteria yaitu : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 2. Kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosure</i>). 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau <i>Unqualified Opinion</i> menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material terkait posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan sistem pengendalian internal yang memadai.

2.3 Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan sumber daya yang tersedia, dan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, disusun Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan DPA Perubahan dan DPA Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025, yang berupa perubahan pada pagu anggaran dan target kinerja beberapa Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran jangka menengahnya dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh penerima dan pemberi amanah dengan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025, Perjanjian Kinerja BKAD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP

Selanjutnya, kerangka pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025, mulai dari Renja Murni, APBD murni, Perubahan Renja, Pergeseran APBD, dan Perubahan APBD, dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 2.4.
Kerangka Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)					Alasan Perubahan
					Renja Murni	APBD Murni	Perubahan Renja	Pergeseran APBD	Perubahan APBD	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	210.105.248.000	210.205.357.562	207.802.589.122	207.802.589.122	211.145.563.985,12	Kebijakan Efisiensi Anggaran
5	02			KEUANGAN	210.105.248.000	210.205.357.562	207.802.589.122	207.802.589.122	211.145.563.985,12	
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.113.697.000	22.898.770.135	22.517.838.535	22.517.838.535	24.615.153.592,00	
5	02	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.594.000	57.594.000	31.149.000	31.149.000	31.149.000,00	
5	02	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.254.185.000	4.931.252.500	4.929.312.500	4.929.312.500	3.996.937.557,00	
5	02	01	2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.904.000	4.904.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000,00	
5	02	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.265.000	24.265.000	7.455.000	7.455.000	7.455.000,00	
5	02	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	382.518.000	382.518.000	175.117.000	175.117.000	194.307.000,00	
5	02	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.500.000	48.500.000	67.000.000	67.000.000	71.000.000,00	
5	02	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.114.490.000	17.120.895.635	17.091.496.635	17.091.496.635	20.094.496.635,00	
5	02	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.241.000	328.841.000	214.028.400	214.028.400	217.528.400,00	



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)					Alasan Perubahan
					Renja Murni	APBD Murni	Perubahan Renja	Pergeseran APBD	Perubahan APBD	
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	184.288.727.900	185.231.974.327	184.341.758.387	184.341.758.387	185.145.918.193,12	Kebijakan Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.110.460.800	2.154.462.800	1.318.813.300	1.318.813.300	1.654.034.300,00	
5	02	02	2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.210.436.200	1.210.136.200	452.584.600	452.584.600	642.103.100,00	
5	02	02	2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.789.362.500	1.789.362.500	962.947.000	962.947.000	1.138.127.000,00	
5	02	02	2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	179.000.000.000	179.878.544.427	181.559.069.287	181.559.069.287	181.532.231.593,12	
5	02	02	2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	178.468.400	199.468.400	48.344.200	48.344.200	179.422.200,00	
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.702.823.100	942.992.200	942.992.200	942.992.200	1.384.492.200	
5	02	03	2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.702.823.100	942.992.200	942.992.200	942.992.200	1.384.492.200	
J U M L A H					210.105.248.000	210.205.357.562	207.802.589.122	207.802.589.122	211.145.563.985,12	



2.4 Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Renstra

Target kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.5.
Target Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan		Target Kinerja Tahun 2025	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5	02				KEUANGAN				
5	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKAD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKAD	83,75%	83,75%
5	02	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen
						Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Dokumen	29 Dokumen
5	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ Bulan	36 Orang/ Bulan
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan		Target Kinerja Tahun 2025	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen
5	02	001	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen
5	02	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	1 Orang
5	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan		Target Kinerja Tahun 2025	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan
5	02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5 Unit
5	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
5	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	62 Unit	62 Unit
5	02	002			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu	Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu	100 %	100 %
						Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja	Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja	100 %	100 %
						Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	100 %	100 %
5	02	002	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen
						Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan		Target Kinerja Tahun 2025	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
5	02	002	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen	4 Dokumen
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4 Laporan	4 Laporan



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan		Target Kinerja Tahun 2025	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	4 Dokumen
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	51 Orang	51 Orang
5	02	002	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	1 Laporan	1 Laporan
						Jumlah Perda Realisasi APBD	Jumlah Perda Realisasi APBD	1 Dokumen	1 Dokumen
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	47 Laporan	47 Laporan
5	02	002	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan
5	02	002	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
5	02	003			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang tepat waktu	100 %	100 %
5	02	003	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda	1 Laporan	2 Laporan
						Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	1 Dokumen	2 Dokumen



Pada tahun 2025, terdapat perubahan pagu anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dari anggaran semula Rp.210.205.357.562,00 pada APBD murni menjadi Rp.207.802.589.122,00 pada Pergeseran APBD, atau berkurang sebesar Rp.2.402.768.440,00 dan menjadi Rp.211.145.563.985,12 pada Perubahan APBD, atau bertambah sebesar Rp.940.206.423,12 dari pagu APBD murni. Perubahan pagu anggaran tersebut menyebabkan perubahan target kinerja pada beberapa Kegiatan sebagai berikut :

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, indikator kinerja Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, target di APBD murni sebanyak 3 Orang, berkurang menjadi 1 Orang pada Perubahan APBD.
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, target di APBD murni sebanyak 4 Unit, bertambah menjadi 5 Unit pada Perubahan APBD.
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah, indikator kinerja Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda, target di APBD murni sebanyak 1 Dokumen bertambah menjadi 2 Dokumen pada Perubahan APBD, dan indikator kinerja Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda, target di APBD murni sebanyak 1 Laporan bertambah menjadi 2 Laporan pada Perubahan APBD.



BAB III KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Analisis Sumber Daya Manusia

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah.

Pada tahun 2025, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 35 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari 32 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 16 orang PPPK Paruh Waktu. Dari jumlah sumber daya manusia yang ada tersebut, dapat diuraikan ke dalam beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jenis Kelamin
 - 1) Pegawai Laki-laki : 17 orang
 - 2) Pegawai Perempuan : 15 orang
- b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Ruang
 - 1) Pegawai Golongan IV : 4 orang
 - 2) Pegawai Golongan III : 22 orang
 - 3) Pegawai Golongan II : 6 orang
- c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
 - 1) Sarjana Strata 2 (S2) : 8 orang
 - 2) Sarjana Strata 1 (S1) : 17 orang
 - 3) D III : 3 orang
 - 4) SLTA sederajat : 4 orang
- d. Jumlah PPPK berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
 - 1) Sarjana Strata 1 (S1) : 2 orang
 - 2) Sekolah Menengah Atas (SMA) : 1 orang
- e. Jumlah PPPK Paruh Waktu berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
 - 1) Sarjana Strata 1 (S1) : 9 orang
 - 2) Sekolah Menengah Atas (SMA) : 7 orang



Berdasarkan jumlah sumber daya manusia yang ada, secara kuantitatif belum sesuai dengan kebutuhan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat. Namun secara kualitatif, sumber daya manusia yang ada cukup mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerjanya, yakni dengan diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

3.2 Analisis Sarana dan Prasarana

a. Mesin dan peralatan :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Alat berat | : 2 unit |
| 2) Kendaraan roda empat | : 5 unit |
| 3) Kendaraan roda dua | : 18 unit |
| 4) Alat bengkel | : 3 unit |
| 5) Alat ukur | : 2 unit |
| 6) Alat kantor & rumah tangga | : 1.488 buah |
| 7) Alat pertanian | : 1 buah |
| 8) Alat studio dan komunikasi | : 28 unit |

b. Gedung dan bangunan :

- | | |
|---------------------|------------|
| 1) Bangunan gedung | : 647 m2 |
| 2) Bangunan monumen | : 276 buah |

c. Jalan, jembatan, bangunan air, jaringan dan instalasi :

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1) Jaringan/instalasi | : 2 unit |
|-----------------------|----------|

d. Aset tetap lainnya :

- | | |
|---------|-----------|
| 1) Buku | : 1 paket |
|---------|-----------|

e. Aset tak berwujud : 21 unit

f. Aset lain-lain : 318 buah

Sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset, yakni dengan diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.



3.3 Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025

Untuk Tahun Anggaran 2025, disahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024. Berdasarkan Perda tersebut, jumlah Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp.210.205.357.562,00. Kemudian melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025, terjadi penurunan pagu Belanja menjadi Rp.207.802.589.122,00. Selanjutnya, dengan disahkannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025, pagu Belanja bertambah menjadi Rp.211.145.563.985,12.

Jika dibandingkan dengan pagu Belanja pada APBD murni TA. 2024, terjadi peningkatan pagu, di mana pagu Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat TA. 2024 adalah sebesar Rp.206.213.505.813,00. Selanjutnya jika dibandingkan dengan pagu Belanja pada Pergeseran APBD TA. 2024 yang ditetapkan setelah Perubahan APBD, terjadi peningkatan pagu, di mana pagu Belanja TA. 2024 adalah sebesar Rp.209.708.940.884,00.

Pada awal tahun 2025, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan melakukan pemangkasan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp.256,1 triliun serta pemangkasan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp.50,59 triliun. Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat mengambil kebijakan efisiensi anggaran Belanja Daerah, di mana penetapan alokasi Belanja Daerah mempertimbangkan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah. Maka di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat, setiap Sub Kegiatan mengalami penurunan pagu dari TA. 2024, kecuali pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang pagunya meningkat cukup signifikan, sehingga terjadi peningkatan pagu total anggaran, yang disebabkan antara lain :

- Peningkatan pagu iuran Jaminan Kesehatan ASN (jumlah signifikan pada BPJS TPG), Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, dan Jaminan Kematian ASN.
- Dianggarkannya Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

Rincian DPA Perubahan TA. 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Tabel berikut.



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel. 3.1.
DPA Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD					
KAB. LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025																			
Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.02.0.00.0.00.22.0000/001/2025																			
SKPD : 5.02.0.00.0.00.22.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah																			
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																			
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T + 1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		1 + 1		
					Sebelum					Tahun									
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja TidakTerduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja TidakTerduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%			
5.02.0.00.0.00.22.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						33.314.447.112	262.600.000	2.147.413.550	174.480.896.900	210.205.357.562	32.714.276.369	149.290.000	3.282.046.716,12	174.999.950.900	211.145.563.985,12	940.206.423,12	0,45		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		33.314.447.112	262.600.000	2.147.413.550	174.480.896.900	210.205.357.562	32.714.276.369	149.290.000	3.282.046.716,12	174.999.950.900	211.145.563.985,12	940.206.423,12	0,45	
5	2				KEUANGAN		33.314.447.112	262.600.000	2.147.413.550	174.480.896.900	210.205.357.562	32.714.276.369	149.290.000	3.282.046.716,12	174.999.950.900	211.145.563.985,12	940.206.423,12	0,45	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		22.850.270.135	48.500.000	-	-	22.898.770.135	24.544.153.592	71.000.000	-	-	24.615.153.592,00	1.716.383.457,00	6,97	
5	2	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		57.594.000	-	-	-	57.594.000	31.149.000	-	-	-	31.149.000,00	- 26.445.000,00	(84,90)	
5	2	1	2,01	0001	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa	21.349.000	-	-	-	21.349.000	16.044.000	-	-	-	16.044.000,00	- 5.305.000,00	(33,07)
5	2	1	2,01	0002	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa	4.245.000	-	-	-	4.245.000	1.780.000	-	-	-	1.780.000,00	- 2.465.000,00	(138,48)
5	2	1	2,01	0003	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa	4.120.000	-	-	-	4.120.000	1.780.000	-	-	-	1.780.000,00	- 2.340.000,00	(131,46)
5	2	1	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa	4.120.000	-	-	-	4.120.000	2.055.000	-	-	-	2.055.000,00	- 2.065.000,00	(100,49)
5	2	1	2,01	0005	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa	4.120.000	-	-	-	4.120.000	1.780.000	-	-	-	1.780.000,00	- 2.340.000,00	(131,46)
5	2	1	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa	13.895.000	-	-	-	13.895.000	6.980.000	-	-	-	6.980.000,00	- 6.915.000,00	(99,07)
5	2	1	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa	5.745.000	-	-	-	5.745.000	730.000	-	-	-	730.000,00	- 5.015.000,00	(686,99)
5	2	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.931.252.500	-	-	-	4.931.252.500	3.996.937.557	-	-	-	3.996.937.557,00	- 934.314.943,00	(23,38)
5	2	1	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa	4.927.067.500	-	-	-	4.927.067.500	3.994.692.557	-	-	-	3.994.692.557,00	- 932.374.943,00	(23,34)



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T - 1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T + 1	
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja TidakTerduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja TidakTerduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
5	2	1	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		1.445.000	-	-	-	1.445.000	815.000	-	-	-	815.000,00	- 630.000,00	(77.30)		
5	2	1	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		1.295.000	-	-	-	1.295.000	615.000	-	-	-	615.000,00	- 680.000,00	(110.57)		
5	2	1	2,02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku		1.445.000	-	-	-	1.445.000	815.000	-	-	-	815.000,00	- 630.000,00	(77.30)		
5	2	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.904.000	-	-	-	4.904.000	2.280.000	-	-	-	2.280.000,00	- 2.624.000,00	(115.09)		
5	2	1	2,03	0006	Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku		4.904.000	-	-	-	4.904.000	2.280.000	-	-	-	2.280.000,00	- 2.624.000,00	(115.09)		
5	2	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				24.265.000	-	-	-	24.265.000	7.455.000	-	-	-	7.455.000,00	- 16.810.000,00	(225.49)		
5	2	1	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		9.265.000	-	-	-	9.265.000	2.455.000	-	-	-	2.455.000,00	- 6.810.000,00	(277.39)		
5	2	1	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		15.000.000	-	-	-	15.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000,00	- 10.000.000,00	(200.00)		
5	2	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				382.518.000	-	-	-	382.518.000	194.307.000	-	-	-	194.307.000,00	- 188.211.000,00	(96.86)		
5	2	1	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		5.983.000	-	-	-	5.983.000	5.983.000	-	-	-	5.983.000,00	-	-		
5	2	1	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		110.180.000	-	-	-	110.180.000	58.900.000	-	-	-	58.900.000,00	- 51.280.000,00	(87.06)		
5	2	1	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		3.960.000	-	-	-	3.960.000	3.960.000	-	-	-	3.960.000,00	-	-		
5	2	1	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		4.131.000	-	-	-	4.131.000	1.605.000	-	-	-	1.605.000,00	- 2.526.000,00	(157.38)		
5	2	1	2,06	0009	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		258.264.000	-	-	-	258.264.000	123.859.000	-	-	-	123.859.000,00	- 134.405.000,00	(108.51)		
5	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah				-	48.500.000	-	-	-	48.500.000	-	71.000.000	-	-	71.000.000,00	22.500.000,00	31,69	
5	2	1	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		-	48.500.000	-	-	-	48.500.000	-	71.000.000	-	-	71.000.000,00	22.500.000,00	31,69	
5	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17.120.895.635	-	-	-	-	17.120.895.635	20.094.496.635	-	-	-	20.094.496.635,00	2.973.601.000,00	14,80	



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T - 1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T + 1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja TidakTerduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja TidakTerduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	2	1	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		4.940.000	-	-	-	4.940.000	4.940.000	-	-	4.940.000,00	-	-		
5	2	1	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		69.040.000	-	-	-	69.040.000	69.040.000	-	-	69.040.000,00	-	-		
5	2	1	2,08	0004	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		17.046.915.635	-	-	-	17.046.915.635	20.020.516.635	-	-	20.020.516.635,00	2.973.601.000,00	14,85		
5	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah				328.841.000	-	-	-	328.841.000	217.528.400	-	-	217.528.400,00	- 111.312.600,00	(51,17)		
5	2	1	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		257.500.000	-	-	-	257.500.000	153.300.000	-	-	153.300.000,00	- 104.200.000,00	(67,97)		
5	2	1	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		26.100.000	-	-	-	26.100.000	26.100.000	-	-	26.100.000,00	-	-		
5	2	1	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		45.241.000	-	-	-	45.241.000	38.128.400	-	-	38.128.400,00	- 7.112.600,00	(18,65)		
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				8.548.863.877	54.800.000	2.147.413.550	174.480.896.900	185.231.974.327	6.860.720.577	3.200.000	3.282.046.716,12	174.999.950.900	185.145.918.193,12	- 86.056.133,88	(0,05)	
5	2	2	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2.154.462.800	-	-	-	2.154.462.800	1.654.034.300	-	-	1.654.034.300,00	- 500.428.500,00	(30,26)		
5	2	2	2,01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUAdan PPAS	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		146.729.400	-	-	-	146.729.400	175.872.400	-	-	175.872.400,00	29.143.000,00	16,57		
5	2	2	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		130.838.000	-	-	-	130.838.000	90.784.000	-	-	90.784.000,00	- 40.054.000,00	(44,12)		
5	2	2	2,01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		855.523.000	-	-	-	855.523.000	647.545.200	-	-	647.545.200,00	- 207.977.800,00	(32,12)		
5	2	2	2,01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		885.423.000	-	-	-	885.423.000	658.991.300	-	-	658.991.300,00	- 226.431.700,00	(34,36)		



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T - 1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T + 1			
									Sebelum					Tahun								Setelah		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja TidakTerduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja TidakTerduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%				
5	2	2	2,01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		90.255.400	-	-	-	-	90.255.400	40.127.400	-	-	-	40.127.400,00	- 50.128.000,00	(124.92)			
5	2	2	2,01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		45.694.000	-	-	-	-	45.694.000	40.714.000	-	-	-	40.714.000,00	- 4.980.000,00	(12.23)			
5	2	2	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.176.336.200	33.800.000	-	-	-	1.210.136.200	638.903.100	3.200.000	-	-	642.103.100,00	- 568.033.100,00	(88.46)			
5	2	2	2,02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		24.800.000	200.000	-	-	-	25.000.000	12.430.000	200.000	-	-	12.630.000,00	- 12.370.000,00	(97.94)			
5	2	2	2,02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		77.775.000	-	-	-	-	77.775.000	46.173.000	-	-	-	46.173.000,00	- 31.602.000,00	(68.44)			
5	2	2	2,02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		599.850.000	-	-	-	-	599.850.000	397.176.000	-	-	-	397.176.000,00	- 202.674.000,00	(51.03)			
5	2	2	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		204.400.000	15.600.000	-	-	-	220.000.000	83.479.400	-	-	-	83.479.400,00	- 136.520.600,00	(163.54)			
5	2	2	2,02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotonganatas SP2D dengan Instansi Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		250.000.000	18.000.000	-	-	-	268.000.000	96.985.200	3.000.000	-	-	99.985.200,00	- 168.014.800,00	(168.04)			
5	2	2	2,02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		19.511.200	-	-	-	-	19.511.200	2.659.500	-	-	-	2.659.500,00	- 16.851.700,00	(633.64)			
5	2	2	2,03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan PelaporanKeuangan Daerah				1.789.362.500	-	-	-	-	1.789.362.500	1.138.127.000	-	-	-	1.138.127.000,00	- 651.235.500,00	(57.22)			
5	2	2	2,03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		36.823.000	-	-	-	-	36.823.000	12.951.000	-	-	-	12.951.000,00	- 23.872.000,00	(184.33)			
5	2	2	2,03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		180.506.000	-	-	-	-	180.506.000	36.364.000	-	-	-	36.364.000,00	- 144.142.000,00	(396.39)			



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T - 1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T + 1
									Sebelum					Tahun							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja TidakTerduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja TidakTerduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	2	2	2,03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		147.465.000	-	-	-	147.465.000	58.625.000	-	-	58.625.000,00	- 88.840.000,00	(151.54)		
5	2	2	2,03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		491.602.000	-	-	-	491.602.000	256.732.000	-	-	256.732.000,00	- 234.870.000,00	(91.48)		
5	2	2	2,03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		605.268.000	-	-	-	605.268.000	518.344.000	-	-	518.344.000,00	- 86.924.000,00	(16.77)		
5	2	2	2,03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		40.201.000	-	-	-	40.201.000	22.114.000	-	-	22.114.000,00	- 18.087.000,00	(81.79)		
5	2	2	2,03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		20.838.000	-	-	-	20.838.000	14.055.000	-	-	14.055.000,00	- 6.783.000,00	(48.26)		
5	2	2	2,03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		28.132.000	-	-	-	28.132.000	11.505.000	-	-	11.505.000,00	- 16.627.000,00	(144.52)		
5	2	2	2,03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		-	-	-	-	-	98.357.000	-	-	98.357.000,00	98.357.000,00	100		
5	2	2	2,03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		-	-	-	-	-	59.823.000	-	-	59.823.000,00	59.823.000,00	100		
5	2	2	2,03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		80.958.000	-	-	-	80.958.000	49.257.000	-	-	49.257.000,00	- 31.701.000,00	(64.36)		
5	2	2	2,03	0012	Pembinaan PengelolaanKeuangan BLUD Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		157.569.500	-	-	-	157.569.500	-	-	-	-	- 157.569.500,00	(Infinity)		



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T - 1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T + 1			
									Sebelum					Tahun								Setelah		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%				
5	2	2	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				3.250.233.977	-	2.147.413.550	174.480.896.900	179.878.544.427	3.250.233.977	-	3.282.046.716,12	174.999.950.900	181.532.231.593,12	1.653.687.166,12	0,91				
5	2	2	2,04	0008	Analisis Perencanaan danPenyaluran Bantuan Keuangan	Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Desa; Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		3.250.233.977	-	2.147.413.550	174.480.896.900	179.878.544.427	3.250.233.977	-	3.282.046.716,12	174.999.950.900	181.532.231.593,12	1.653.687.166,12	0,91				
5	2	2	2,05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				178.468.400	21.000.000	-	-	199.468.400	179.422.200	-	-	-	179.422.200,00	- 20.046.200,00	(11.17)				
5	2	2	2,05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		178.468.400	21.000.000	-	-	199.468.400	179.422.200	-	-	-	179.422.200,00	- 20.046.200,00	(11.17)				
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.915.313.100	159.300.000	-	-	2.074.613.100	1.309.402.200	75.090.000	-	-	1.384.492.200,00	- 690.120.900,00	(49.85)				
5	2	3	2,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.915.313.100	159.300.000	-	-	2.074.613.100	1.309.402.200	75.090.000	-	-	1.384.492.200,00	- 690.120.900,00	(49.85)				
5	2	3	2,01	0001	Penyusunan Standar Harga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		145.787.300	-	-	-	145.787.300	64.990.200	-	-	-	64.990.200,00	- 80.797.100,00	(124.32)				
5	2	3	2,01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		72.600.000	-	-	-	72.600.000	38.361.000	-	-	-	38.361.000,00	- 34.239.000,00	(89.25)				
5	2	3	2,01	0003	Penyusunan PerencanaanKebutuhan Barang Milik Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		197.052.000	-	-	-	197.052.000	86.770.400	-	-	-	86.770.400,00	- 110.281.600,00	(127.10)				
5	2	3	2,01	0005	Penatausahaan Barang MilikDaerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		347.052.200	17.750.000	-	-	364.802.200	179.808.600	-	-	-	179.808.600,00	- 184.993.600,00	(102.88)				
5	2	3	2,01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		209.657.000	-	-	-	209.657.000	97.276.400	-	-	-	97.276.400,00	- 112.380.600,00	(115.53)				
5	2	3	2,01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		109.390.800	54.000.000	-	-	163.390.800	25.133.400	44.940.000	-	-	70.073.400,00	- 93.317.400,00	(133.17)				
5	2	3	2,01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		162.849.600	-	-	-	162.849.600	475.604.000	-	-	-	475.604.000,00	312.754.400,00	65,76				
5	2	3	2,01	0009	Pengawasan dan PengendalianPengelolaan Barang Milik Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		76.445.200	-	-	-	76.445.200	66.970.200	-	-	-	66.970.200,00	- 9.475.000,00	(14.15)				



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T - 1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T + 1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja TidakTerduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja TidakTerduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	2	3	2,01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		87.516.400	87.550.000	-	-	175.066.400	48.783.400	30.150.000	-	-	78.933.400,00	- 96.133.000,00	(121.79)	
5	2	3	2,01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		313.650.200	-	-	-	313.650.200	135.532.600	-	-	-	135.532.600,00	- 178.117.600,00	(131.42)	
5	2	3	2,01	0012	Penyusunan Laporan Barang MilikDaerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		85.131.200	-	-	-	85.131.200	40.865.400	-	-	-	40.865.400,00	- 44.265.800,00	(108.32)	
5	2	3	2,01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan/Desa		108.181.200	-	-	-	108.181.200	49.306.600	-	-	-	49.306.600,00	- 58.874.600,00	(119.41)	
JUMLAH									33.314.447.112	262.600.000	2.147.413.550	174.480.896.900	210.205.357.562	32.714.276.369	149.290.000	3.282.046.716,12	174.999.950.900	211.145.563.985,12	940.206.423,12	0,45	



BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 700/LHE-71/II/2025 tanggal 26 Mei 2025, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah 85,65 termasuk dalam kategori “A” dengan predikat Memuaskan, mengalami kenaikan nilai SAKIP dari sebelumnya tahun 2024, yaitu 84,60.

Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluator Internal adalah :

1. Agar memberikan reward terhadap pegawai yang sangat baik kinerjanya dan punishment terhadap pegawai yang sangat buruk kinerjanya serta memaksimalkan penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai dasar pemberian TPP.

Berdasarkan rekomendasi Tim Evaluator Internal tersebut, tindak lanjut yang dilakukan adalah :

1. Pembayaran TPP ASN Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang didasarkan pada produktivitas kerja dan disiplin kerja ASN. Selanjutnya, pemberian reward untuk pegawai yang sangat baik kinerjanya dan punishment untuk pegawai yang sangat buruk kinerjanya akan menjadi perhatian pimpinan, berupa apresiasi dan hukuman dalam bentuk yang akan dipertimbangkan kemudian.
2. Target yang ditetapkan adalah Pembayaran TPP ASN Pemerintah Kabupaten Lampung Barat TA. 2026 didasarkan pada produktivitas kerja (60%) dan disiplin kerja (40%), yang mengacu pada Perbup TPP Tahun 2026 yang sedang dalam proses penandatanganan Bupati Lampung Barat.

4.1 Capaian Kinerja

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Skala Predikat Capaian Kinerja Pendekatan Permendagri No. 86 Tahun 2017

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja, dan penilaian tingkat pencapaian target Sasaran dari masing-masing indikator kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Program dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025, hasil reviu, dan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 1 indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah, dengan indikator kinerja :

- Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, target WTP setiap tahun.

Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja yang sesuai target ditunjukkan pada indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja 100%. Target kinerja indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Predikat Opini WTP. Pada tahun 2025, target Predikat Opini WTP tercapai sesuai yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Predikat Opini BPK ini didasarkan pada 3 (tiga) komponen, yaitu pemeriksaan atas Laporan Keuangan, pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal, dan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dari ketiga komponen tersebut, komponen pertama yaitu pemeriksaan atas Laporan Keuangan, menjadi tugas utama dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan ini didukung oleh seluruh Perangkat daerah.



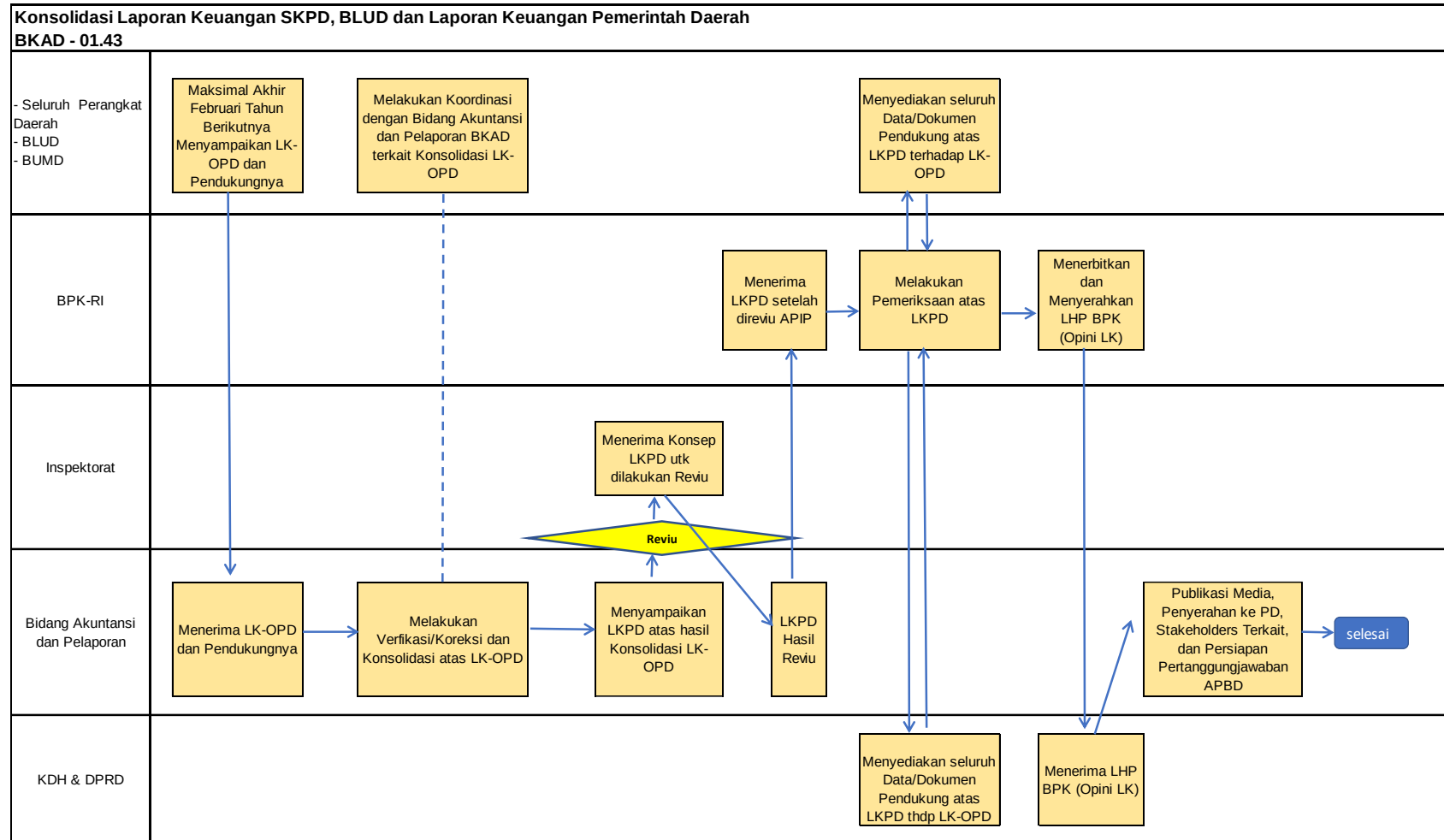
Sementara komponen kedua yaitu pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal merupakan tugas utama dari Inspektorat Daerah sebagai Auditor Internal. Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam komponen kedua ini adalah sebagai objek pemeriksaan utama sekaligus pihak yang mengimplementasikan pengendalian internal terkait keuangan dan aset daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab menyiapkan data keuangan, aset, dan dokumen terkait operasional keuangan untuk diperiksa oleh Auditor Internal (Inspektorat) dan Auditor Eksternal (BPK). Selanjutnya, komponen ketiga merupakan pemeriksaan atas kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam pengelolaan Keuangan Daerah, efektivitas Sistem Pengendalian Internal, tindak lanjut rekomendasi BPK, dan prosedur pengadaan. Komponen ketiga ini menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, ketiga komponen yang membentuk Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat. Dari ketiga komponen tersebut, komponen pertama yang menjadi tanggung jawab Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dan didukung oleh anggaran berupa Sub Kegiatan.

Berikut kami sampaikan Peta Proses Bisnis Kegiatan Utama yang mendukung tercapainya target Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Predikat Opini WTP.

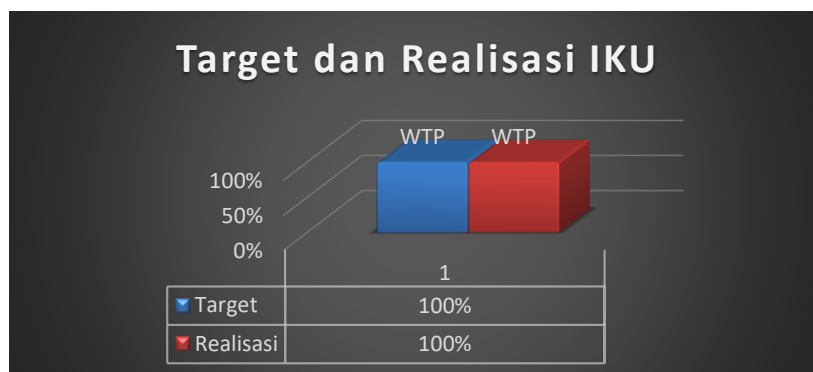


PETA PROSES BISNIS KEGIATAN UTAMA BKAD KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Gambar 4.1.

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.2.

4.2 Perbandingan Kinerja

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

1. Kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya, target yang direncanakan, dan target Renstra.
2. Kinerja nyata dengan target nasional.
3. Kinerja nyata dengan target atau capaian kinerja tingkat Provinsi Lampung.
4. *Benchmarking*, yaitu kinerja nyata dengan perangkat daerah yang sama pada tingkat Provinsi Lampung.

a. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya, Target yang direncanakan, dan Target Renstra

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran yang dicapai pada tahun 2025 dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2025, juga membandingkan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya, serta membandingkan capaian sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir Renstra, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.3.
Evaluasi Pencapaian Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		%	Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
									Target	Realisasi			
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

b. Perbandingan Kinerja Nyata dengan Perangkat Daerah yang Sama pada Tingkat Provinsi Lampung (*Benchmarking*)

Perbandingan kinerja nyata untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang diraih Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Lampung, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.4.
Perbandingan Kinerja Nyata dengan Pemerintah
Tingkat Provinsi Lampung (*Benchmarking*)

No	Nama Pemerintah Daerah	Predikat Opini BPK atas LKPD Pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Provinsi Lampung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kota Bandar Lampung	WDP	WDP	WDP	WTP PSH dan PHL	WTP
3.	Kota Metro	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
4.	Kabupaten Lampung Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kabupaten Tulang Bawang	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
6.	Kabupaten Pringsewu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kabupaten Lampung Timur	WTP	WTP	WTP PSH	WTP	WTP
8.	Kabupaten Pesawaran	WTP	WTP	WTP PSH	WTP PSH	WTP
9.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	WTP	WTP	WTP PSH	WTP PSH	WTP
10.	Kabupaten Pesisir Barat	WTP	WTP	WTP PSH	WTP PSH	WTP
11.	Kabupaten Lampung Utara	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
12.	Kabupaten Tanggamus	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
13.	Kabupaten Lampung Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	Kabupaten Lampung Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	Kabupaten Mesuji	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	Kabupaten Way Kanan	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP

Keterangan :

1. WDP : Wajar Dengan Pengecualian
2. WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
3. WTP PSH : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Penekanan Suatu Hal
4. WTP PSH dan PHL : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain

Kabupaten Lampung Barat telah meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun selama 15 kali berturut-turut. Meskipun tergolong Kabupaten dengan tingkat kemandirian yang rendah, di mana Pendapatan Daerah masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer, dengan nilai Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai 2 digit, yakni hanya sekitar 8 % dari total Pendapatan Daerah, tata kelola keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, dengan total APBD yang terbatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mampu melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas daerah, menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan alokasi yang proporsional antara Belanja Mandatory, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, mampu memenuhi kewajiban hutang daerah, dan tidak pernah mengalami gagal bayar (memiliki likuiditas kas yang lancar).

c. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5.
Capaian Sasaran Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
I	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah				
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan hasil analisis atas pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 sebagai berikut :

I. Penghitungan Indikator Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun 2025

a. Indikator "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".

Indikator ini dihitung dengan penjelasan/alasan/formulasi/perhitungan :

Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, berdasarkan hasil audit terhadap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yang meliputi :

1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penyusunan laporan ini dilaksanakan di dalam Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat, dan didukung oleh Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada seluruh Perangkat Daerah.

Indikator utama atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK, antara lain :

- a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Menilai apakah Laporan Keuangan telah disajikan sesuai standar.
- b) Kecukupan Pengungkapan (*Adequacy of Disclosures*): Memastikan seluruh informasi penting diungkapkan secara jujur.
- c) Kewajaran Informasi Keuangan: Memberikan Opini (WTP, WDP, TW, atau TMP) atas Laporan Keuangan yang disusun.

2. Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPK memastikan 5 (lima) unsur utama ini telah dilakukan secara patut dan memadai, yaitu:

- a) Lingkungan Pengendalian: Menilai apakah pimpinan instansi menciptakan suasana yang mendukung kepatuhan dan integritas (misal: kode etik, kompetensi pegawai, struktur organisasi).
 - b) Penilaian Risiko: Mengukur apakah instansi telah mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan.
 - c) Kegiatan Pengendalian: Memeriksa kebijakan dan prosedur untuk memastikan mitigasi risiko berjalan (misal: otorisasi transaksi, pemisahan tugas, pengamanan aset).
 - d) Informasi dan Komunikasi: Memastikan data keuangan dan operasional relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan secara tepat waktu.
 - e) Pemantauan Pengendalian Intern: Menilai pemantauan terus-menerus atas kinerja SPI (misal: evaluasi terpisah oleh Inspektorat/auditor internal).
3. Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator utama pemeriksaan oleh BPK terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain :

- a) Kesesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Menilai apakah pengelolaan Keuangan Negara (penerimaan, pengeluaran, aset, dan utang) telah mematuhi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan regulasi terkait lainnya.
- b) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI): Memeriksa apakah mekanisme pengendalian internal entitas cukup kuat untuk mencegah ketidakpatuhan.
- c) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK: Menilai kepatuhan entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya untuk perbaikan.
- d) Kepatuhan terhadap Prosedur Pengadaan: Memastikan Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Pengadaan yang berlaku



Berdasarkan hasil audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, pencapaian untuk indikator sasaran adalah : Opini WTP.

Tabel 4.6.
Data Dukung Capaian Indikator Sasaran 1

No.	Data Dukung	Opini BPK
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri dari :	
	- Neraca	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Realisasi Anggaran	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Operasional	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Arus Kas	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Perubahan Ekuitas	Wajar sesuai SAP
	- Catatan atas Laporan Keuangan	Wajar sesuai SAP
2.	Sistem Pengendalian Intern	Memadai dan relevan
3.	Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai SAP

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian atas seluruh data dukung adalah memperoleh Opini Wajar dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, sehingga tercapailah target kinerja “Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yaitu WTP, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor : 24B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 Tanggal 23 Mei 2025.

II. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terhadap Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran tahun 2025 terhadap tahun 2024, sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".
- Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja indikator 1 konsisten mencapai 100 % (dapat mempertahankan Opini WTP), yang telah diraih sejak tahun 2011 hingga tahun 2025 secara berturut-turut.

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8.
Capaian Kinerja Sasaran s.d. Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (%)
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran tahun 2025 dengan target akhir Renstra sebagai berikut :

- a. Indikator "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".
- Tahun 2025 adalah tahun ke-2 Renstra, capaian kinerja indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2025 adalah 100%, di mana target Predikat Opini WTP tercapai. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka capaian kerjanya mencapai 100%.

Perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran tahun 2025 dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 4.3.

4.3 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025, dilaksanakan berbagai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan jumlah Program termasuk Program Rutin sebanyak 3 Program, jumlah Kegiatan termasuk Kegiatan Rutin sebanyak 14 Kegiatan dan jumlah Sub Kegiatan termasuk Sub Kegiatan Rutin sebanyak 63 Sub Kegiatan. Alokasi dana tahun 2025 berdasarkan Perubahan APBD untuk Belanja sebesar Rp.211.145.563.985,12 terealisasi sampai dengan triwulan IV/akhir tahun anggaran sebesar Rp.183.525.242.698,00,00 atau 86,92%.

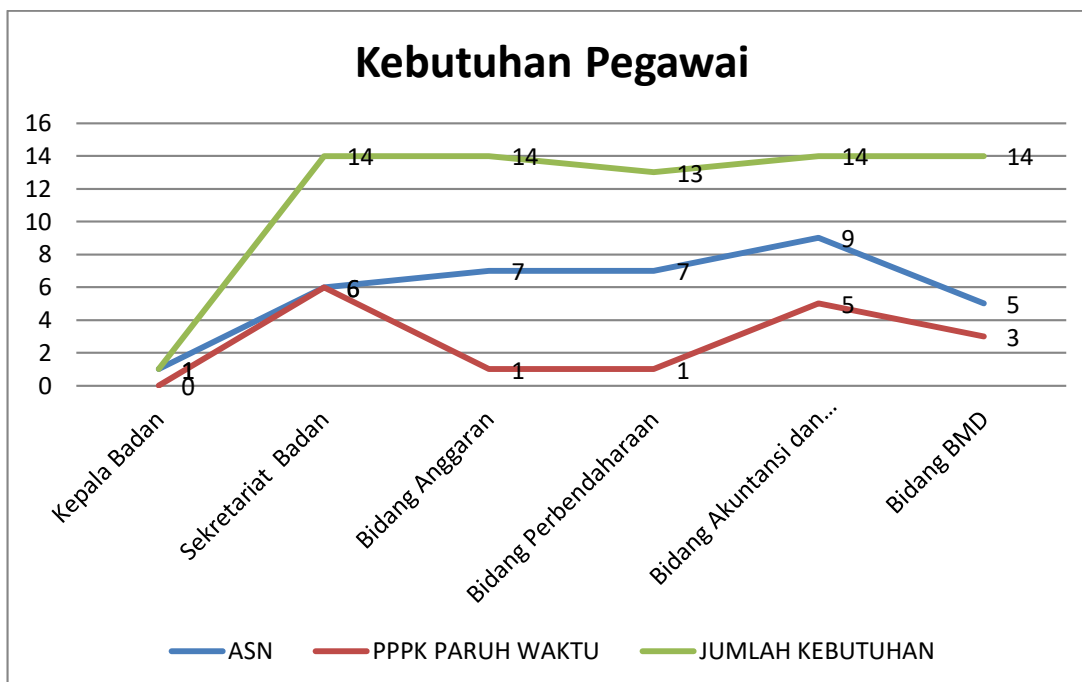
Dari realisasi anggaran tersebut, realisasi anggaran terbesar adalah Belanja Transfer sebesar Rp.154.995.760.160,00, yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Pekon berupa Belanja Bagi Hasil Pajak dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Pekon, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Pekon berupa Belanja Alokasi Dana Desa/Alokasi Dana Pekon (ADD) dan Dana Desa (DD).

Sisa anggaran yang tidak terealisasi pada TA. 2025 adalah sebesar Rp.27.620.321.287,12. Anggaran yang tidak terserap tersebut terbesar adalah berupa Belanja Transfer sebesar Rp.20.004.190.740,00. Selain itu, anggaran yang tidak terserap lainnya berupa Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.1.184.421.216,12, Belanja Operasi sebesar Rp.6.427.841.031,00, dan Belanja Modal sebesar Rp.3.868.300,00.

Tidak terserapnya anggaran Belanja antara lain disebabkan oleh :

1. Tidak terserapnya anggaran Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebesar 78,99%, di mana penyerapan anggaran sesuai dengan nilai Biaya Jasa Transaksi Keuangan yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan.
2. Tidak terserapnya anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman Jangka Menengah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank/BUMN sebesar 51,32%, di mana penyerapan anggaran sesuai dengan jumlah utang jatuh tempo yang harus dibayar berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan.
3. Tidak terserapnya anggaran Belanja Dana Desa sebesar 16,70%, di mana penyerapan anggaran sesuai dengan transfer dari Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa.
4. Tidak terserapnya anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar 27,16%, di mana penyerapan anggaran sesuai dengan realisasi Pajak dan Retribusi Daerah hingga Triwulan III tahun 2025, karena realisasi triwulan IV belum bisa dihitung hingga akhir tahun anggaran, sehingga belum bisa direalisasikan Dana Bagi Hasilnya dan akan dibayarkan kepada pekon pada tahun 2026.
5. Tidak terserapnya Belanja Tidak Terduga sebesar 36,09%, di mana penganggaran belanja ini adalah dalam rangka ketersediaan dana untuk kejadian darurat.
6. Tidak terserapnya Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja sebesar 26,77%.
7. Tidak terserapnya anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Iuran JKK, dan Iuran JKM ASN sebesar 14,53%, di mana realisasi berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
8. Tidak terserapnya anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera ASN sebesar 100%, karena tidak ada tagihan dari BP Tapera.

Selanjutnya, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 didukung oleh berbagai faktor, di antaranya sumber daya aparatur yang terdiri dari ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Keberhasilan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



Gambar 4.4.

Berdasarkan Gambar 4.6. di atas, terlihat bahwa kinerja 70 pegawai sesuai jumlah kebutuhan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat ditangani oleh 35 orang ASN (32 orang PNS dan 3 orang PPPK) ditambah dengan 16 orang PPPK Paruh Waktu sesuai kondisi yang ada. THLS yang ada merupakan Tenaga kontrak tipe B yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Keuangan dan Aset Daerah membiayai kegiatannya dengan anggaran sebesar Rp.211.145.563.985,12, untuk mencapai kinerjanya. Berdasarkan pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebesar Rp.183.525.242.698,00,00 atau 86,92% dari anggaran yang direncanakan dan telah mewujudkan sebagian target kinerjanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah cukup optimal, efektif dan efisien dalam mencapai kinerja sasarannya, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki, berupa sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, serta anggaran.

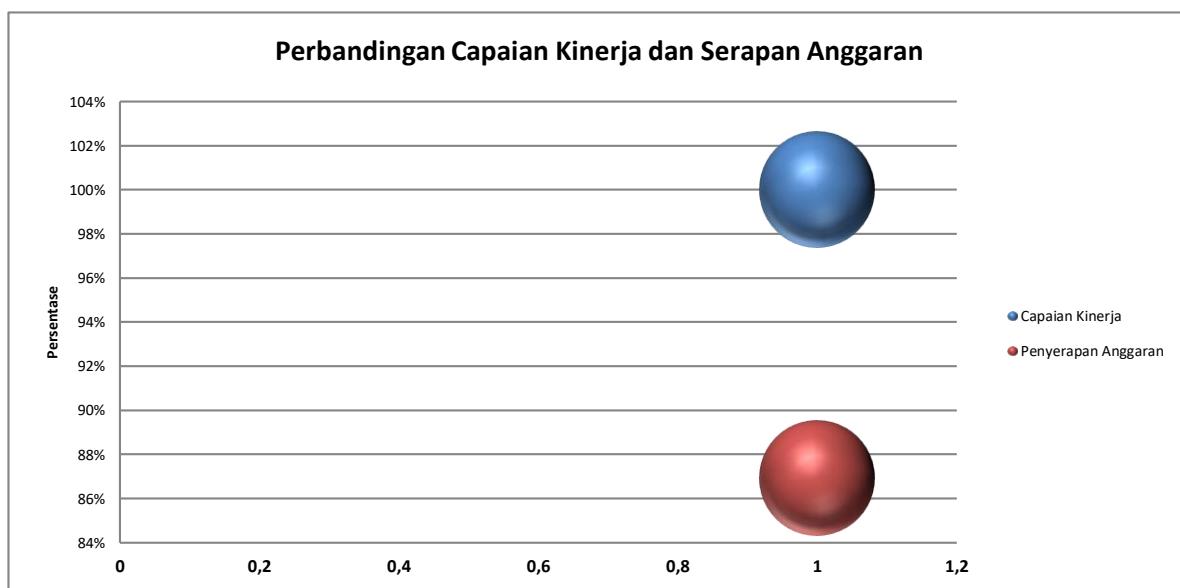
Efisiensi penggunaan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.9.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	86,92%	13,08%
Jumlah Total Efisiensi					13,08%
Rata-rata Efisiensi per Indikator					13,08%

Berdasarkan tabel di atas, Badan Keuangan dan Aset Daerah sepanjang tahun 2025 telah melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan capaian yang cukup baik, di mana pencapaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mencapai target. Selanjutnya, dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, efisiensi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 13,08%.

Sebagai gambaran lebih jelas, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 4.5.

4.4 Inovasi dan Prestasi yang Diraih Perangkat Daerah

Pencapaian indikator kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat yang sesuai target dapat terwujud karena didukung oleh beberapa inovasi yang dilakukan, yaitu :

1. Aplikasi SIPD terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memiliki aplikasi yang terintegrasi, yaitu Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), yang terdiri dari sistem perencanaan (e-SSH, e-RPJMD, e-Renstra, e-Musrenbang, e-RKPD) dan sistem keuangan (e-Budgeting).

2. SIM ASET (Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap).

Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, melalui digitalisasi Aset Tetap Daerah.

3. E-LBMD (Laporan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik).

Aplikasi ini memungkinkan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah melaporkan Barang Milik Daerah secara elektronik, cepat, dan otomatis.

4. KARINDA (Kendaraan Dinas Lampung Barat Terdata).

Aplikasi Pengingat Pajak Kendaraan Dinas. Aplikasi ini memungkinkan pengguna kendaraan dinas mendapatkan informasi jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan dinas secara real time.

5. SIDAP Milik Daerah (Sistem Terintegrasi Arsip Digital Bukti Kepemilikan Aset dan Aset Digital Pemerintah Daerah).

Aplikasi Integrasi Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah. Aplikasi ini memungkinkan Pengelola Barang menyimpan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah secara online dan dapat diakses kapan saja, di mana saja, serta oleh siapa saja.

6. SIGER Kombal (Sistem Informasi Gelar Rekonsiliasi Belanja Modal).

Aplikasi ini memungkinkan terselenggaranya rekonsiliasi Belanja Modal antara Bidang BMD dan Pengurus Barang masing-masing Perangkat Daerah secara online, akurat, terintegrasi, dan hemat waktu.

7. SIPANDU BMD (Sistem Pemindaian Aset Daerah Digital Unggul Berbasis QRCode untuk Barang Milik Daerah).

Aplikasi Inventarisasi Barang Milik Daerah. Aplikasi ini memungkinkan terselenggaranya Inventarisasi Barang Milik Daerah secara online berbasis QRCode sehingga menghasilkan laporan yang cepat, akurat, dan hemat waktu.

8. SIS TARIF (Sistem Informasi Standar Harga Terintegrasi dan Real Time).

Aplikasi ini memungkinkan pengajuan usulan Standar Satuan Harga oleh masing-masing Pengguna Anggaran secara online, real time, dan dapat dimonitor dari mana saja dan kapan saja.

Pada tahun 2025, Kabupaten Lampung Barat kembali meraih prestasi berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Ini adalah untuk kelimabelas kalinya secara berturut-turut Kabupaten Lampung Barat meraih Opini WTP.



Gambar 4.6.
Bupati Lampung Barat Menerima Penghargaan Opini WTP
dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung



BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2025, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) Sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Pencapaian kinerja Sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah, dengan indikator kinerja :
 - Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, realisasi kinerja tahun ini adalah Opini WTP dari target Opini WTP yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.211.145.563.985,12 (berdasarkan Perubahan APBD), dan pada akhir tahun anggaran terealisasi sebesar



Rp.183.525.242.698,00 atau mencapai 86,92%. Dengan demikian, dapat dikatakan kondisi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 adalah SILPA Rp.27.620.321.287,12.

Dengan tersusunnya LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait, baik *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

5.2 Faktor Pendukung Keberhasilan

Pencapaian indikator sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat yang sesuai target dapat terwujud karena didukung oleh beberapa hal, yaitu :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Kabupaten Lampung Barat selama 15 tahun berturut-turut meraih penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dinilai wajar dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penganggaran berbasis kinerja.

Meski saat ini tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi, di mana alokasi PAD Kabupaten Lampung Barat terhadap total Pendapatan Daerah masih rendah, namun Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat mengelola APBD dengan baik. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki *cash flow* yang sehat dan tidak pernah mengalami gagal bayar untuk alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja, memperhatikan prioritas daerah, sesuai kebutuhan, dan taat aturan.

3. Adanya Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memiliki aplikasi yang terintegrasi, yaitu Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), yang terdiri dari sistem perencanaan (e-SSH, e-RPJMD, e-Renstra, e-Musrenbang, e-RKPD) dan sistem keuangan (e-Budgeting).

5.3 Permasalahan

Dalam pencapaian indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat, masih ditemukan beberapa permasalahan yang dapat menghambat pencapaian target kinerja, antara lain :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dinamis.

Kabupaten Lampung Barat selama lebih dari 10 tahun berturut-turut meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Akan tetapi dengan pencapaian tersebut, semakin sulit untuk mempertahankan Opini WTP, karena Auditor BPK dan Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik) terus meningkatkan standar penilaian.

Selain itu, regulasi di bidang pengelolaan keuangan sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan APBD yang telah berjalan.

2. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal, yang disebabkan oleh :
 - a. Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi.
 - b. Belum tersedianya basis data yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.
 - c. Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola Barang Milik Daerah dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - d. Regulasi di bidang pengelolaan aset sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan Standar Satuan Harga yang mempengaruhi penyusunan APBD.



3. Potensi penurunan Pendapatan Daerah akibat penurunan target PAD dan pengurangan Dana Transfer ke daerah sebagai dampak kondisi *force majeure* yang tidak dapat diprediksi ke depannya, seperti pandemi penyakit dan bencana alam.

5.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Sehubungan dengan permasalahan yang masih dan dapat ditemui dalam pencapaian kinerja, rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan agar ke depannya dapat mencapai dan mempertahankan capaian target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis kinerja dan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis sistem informasi dan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang ada melalui pemahaman Peraturan Perundangan maupun melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
4. Meningkatkan koordinasi dan menciptakan sinergi baik di internal Badan Keuangan dan Aset Daerah, dengan seluruh Perangkat Daerah, maupun dengan seluruh *stakeholders*.

Kabupaten Lampung Barat, 11 Februari 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


SUMADI, S.IP., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760607 199903 1 007

L A M P I R A N

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran Tahun 2025	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.149.000.00	4.595.000.00	14.75	9.367.500.00	30.07	13.020.000.00	41.8	30.985.000.00	99.47
		1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.044.000.00	420.000.00	2.62	690.000.00	4.3	690.000.00	4.3	15.880.000.00	98.98
		1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.780.000.00	0.00	0	900.000.00	50.56	980.000.00	55.06	1.780.000.00	100
		1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.780.000.00	900.000.00	50.56	900.000.00	50.56	1.780.000.00	100	1.780.000.00	100
		1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.055.000.00	2.055.000.00	100	2.055.000.00	100	2.055.000.00	100	2.055.000.00	100
		1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.780.000.00	0.00	0	880.000.00	49.44	1.780.000.00	100	1.780.000.00	100
		1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.980.000.00	830.000.00	11.89	3.522.500.00	50.47	5.035.000.00	72.13	6.980.000.00	100
		1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	730.000.00	390.000.00	53.42	420.000.00	57.53	700.000.00	95.89	730.000.00	100
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.996.937.557.00	914.731.256.00	22.89	1.889.888.446.00	47.28	2.644.855.751.00	66.17	3.490.381.980.00	87.33
		1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.994.692.557.00	914.731.256.00	22.9	1.889.888.446.00	47.31	2.644.855.751.00	66.21	3.488.136.980.00	87.32
		1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	815.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	815.000.00	100
		1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	615.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	615.000.00	100
		1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	815.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	815.000.00	100
	1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.280.000.00	890.000.00	39.04	1.265.000.00	55.48	1.805.000.00	79.17	2.280.000.00	100
		1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.280.000.00	890.000.00	39.04	1.265.000.00	55.48	1.805.000.00	79.17	2.280.000.00	100
	1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.455.000.00	0.00	0	0.00	0	2.455.000.00	32.93	7.455.000.00	100
		1.4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.455.000.00	0.00	0	0.00	0	2.455.000.00	100	2.455.000.00	100
		1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	5.000.000.00	100
	1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.307.000.00	36.142.619.00	18.6	75.742.179.00	38.98	110.493.429.00	56.87	192.415.929.00	99.03
		1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.983.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	5.983.000.00	100
		1.5.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.900.000.00	15.380.000.00	26.11	29.080.000.00	49.37	44.688.000.00	75.87	58.872.000.00	99.95
		1.5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000.00	0.00	0	1.980.000.00	50	2.970.000.00	75	3.960.000.00	100
		1.5.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.605.000.00	0.00	0	780.000.00	48.6	1.097.500.00	68.38	1.605.000.00	100
		1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.859.000.00	20.762.619.00	16.76	43.902.179.00	35.45	61.737.929.00	49.85	121.995.929.00	98.5
SASARAN 1 : Meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah			71.000.000.00	0.00	0	0.00	0	69.871.599.99	99.47	71.000.000.00	100
SAKTI BERKABAR Kabupaten Lampung Barat											
Pagu dan Realisasi Anggaran : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											

				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.000.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	69.874.500.00	98.41
	1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.094.496.635.00	3.133.995.649.00	15.6	6.676.078.083.00	33.22	10.167.867.124.00	50.6	16.499.136.484.00	82.11
	1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.940.000.00	1.000.000.00	20.24	2.000.000.00	40.49	3.581.500.00	72.5	4.924.500.00	99.69
	1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.040.000.00	12.602.503.00	18.25	23.938.393.00	34.67	34.792.023.00	50.39	47.516.272.00	68.82
	1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.020.516.635.00	3.120.393.146.00	15.59	6.650.139.690.00	33.22	10.129.493.601.00	50.6	16.446.695.712.00	82.15
	1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.528.400.00	12.882.378.00	5.92	52.444.971.00	24.11	120.466.750.00	55.38	204.949.309.00	94.22
	1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.300.000.00	11.507.378.00	7.51	39.204.971.00	25.57	67.968.750.00	44.34	140.863.309.00	91.89
	1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.100.000.00	1.375.000.00	5.27	8.670.000.00	33.22	18.445.000.00	70.67	26.100.000.00	100
	1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.128.400.00	0.00	0	4.570.000.00	11.99	34.053.000.00	89.31	37.986.000.00	99.63
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
	2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.654.034.300.00	0.00	0	9.213.518.00	0.56	301.514.345.00	18.23	1.389.480.025.00	84.01
	2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	175.872.400.00	0.00	0	0.00	0	7.080.000.00	4.03	151.570.400.00	86.18
	2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	90.784.000.00	0.00	0	0.00	0	54.230.500.00	59.74	84.230.500.00	92.78
	2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	647.545.200.00	0.00	0	0.00	0	128.084.952.00	19.78	532.656.832.00	82.26
	2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	658.991.300.00	0.00	0	9.213.518.00	1.4	94.618.893.00	14.36	559.122.893.00	84.85
	2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	40.127.400.00	0.00	0	0.00	0	17.500.000.00	43.61	33.495.400.00	83.47
	2.1.6	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40.714.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	28.404.000.00	69.76
	2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	642.103.100.00	36.149.170.00	5.63	216.095.858.00	33.65	338.222.200.00	52.67	639.074.008.00	99.53
	2.2.1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12.630.000.00	0.00	0	7.224.000.00	57.2	10.016.000.00	79.3	12.630.000.00	100
	2.2.2	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	46.173.000.00	7.116.640.00	15.41	15.121.940.00	32.75	28.953.240.00	62.71	45.868.240.00	99.34
	2.2.3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	397.176.000.00	14.516.250.00	3.65	113.336.258.00	28.54	160.623.859.00	40.44	396.962.967.00	99.95
	2.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	83.479.400.00	9.178.800.00	11	34.449.400.00	41.27	59.833.250.00	71.67	82.280.250.00	98.56
SAKTI BERKUALITAS Kabupaten Lampung Barat						Pagu dan Realisasi Anggaran : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					

				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.2.5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	99.985.200.00	5.337.480.00	5.34	45.964.260.00	45.97	78.795.851.00	78.81	98.673.051.00	98.69
	2.2.6	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	2.659.500.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2.659.500.00	100
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1.138.127.000.00	5.320.500.00	0.47	448.315.674.00	39.39	704.852.264.00	61.93	927.927.064.00	81.53
	2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12.951.000.00	0.00	0	2.283.000.00	17.63	5.553.000.00	42.88	10.838.500.00	83.69
	2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	36.364.000.00	0.00	0	1.736.000.00	4.77	16.355.500.00	44.98	22.689.000.00	62.39
	2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	58.625.000.00	0.00	0	4.111.000.00	7.01	16.067.000.00	27.41	31.377.900.00	53.52
	2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	256.732.000.00	5.320.500.00	2.07	149.456.674.00	58.22	165.305.814.00	64.39	200.317.814.00	78.03
	2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	518.344.000.00	0.00	0	265.882.000.00	51.29	439.609.950.00	84.81	457.094.450.00	88.18
	2.3.6	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	22.114.000.00	0.00	0	3.162.000.00	14.3	3.162.000.00	14.3	15.326.500.00	69.31
	2.3.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	14.055.000.00	0.00	0	2.925.000.00	20.81	2.925.000.00	20.81	5.487.000.00	39.04
	2.3.8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	11.505.000.00	0.00	0	2.862.000.00	24.88	7.008.000.00	60.91	9.218.000.00	80.12
	2.3.9	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	49.257.000.00	0.00	0	15.898.000.00	32.28	48.866.000.00	99.21	48.866.000.00	99.21
	2.3.10	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	0.00	0.00	0	0.00	32.28	0.00	99.21	0.00	99.21
	2.3.11	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	98.357.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	91.117.900.00	92.64
	2.3.12	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	59.823.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	35.594.000.00	59.5
	2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	181.532.231.593.00	11.016.969.420.00	6.07	80.278.011.714.00	44.22	117.550.055.681.00	64.75	158.628.275.352.00	87.38
	2.4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	181.532.231.593.00	11.016.969.420.00	6.07	80.278.011.714.00	44.22	117.550.055.681.00	64.75	158.628.275.352.00	87.38
	2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	179.422.200.00	26.823.410.00	14.95	26.823.410.00	14.95	28.933.910.00	16.13	174.600.410.00	97.31
	2.5.1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	179.422.200.00	26.823.410.00	14.95	26.823.410.00	14.95	28.933.910.00	16.13	174.600.410.00	97.31
SAKTI BERKIBAR Kabupaten Lampung Barat						Pagu dan Realisasi Anggaran : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAER					

		Target 2020	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										
	3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.384.492.200.00	198.128.800.00	14.31	406.512.237.00	29.36	550.668.637.00	39.77	1.268.407.637.00	91.62
		3.1.1 Penyusunan Standar Harga	64.990.200.00	32.043.000.00	49.3	49.049.650.00	75.47	49.049.650.00	75.47	62.419.650.00	96.04
		3.1.2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	86.770.400.00	0.00	0	11.973.000.00	13.8	25.849.400.00	29.79	86.545.400.00	99.74
		3.1.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah	179.808.600.00	0.00	0	26.840.600.00	14.93	65.697.300.00	36.54	178.517.200.00	99.28
		3.1.4 Inventarisasi Barang Milik Daerah	97.276.400.00	9.750.000.00	10.02	58.450.850.00	60.09	63.814.850.00	65.6	89.798.850.00	92.31
		3.1.5 Pengamanan Barang Milik Daerah	70.073.400.00	10.674.900.00	15.23	36.828.300.00	52.56	38.607.450.00	55.1	62.297.450.00	88.9
		3.1.6 Penilaian Barang Milik Daerah	475.604.000.00	22.796.350.00	4.79	42.076.800.00	8.85	49.193.400.00	10.34	417.124.400.00	87.7
		3.1.7 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	66.970.200.00	0.00	0	9.835.200.00	14.69	38.635.200.00	57.69	64.375.200.00	96.13
		3.1.8 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	78.933.400.00	13.470.150.00	17.07	17.071.550.00	21.63	40.167.000.00	50.89	54.946.100.00	69.61
		3.1.9 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	135.532.600.00	86.620.000.00	63.91	102.243.355.00	75.44	113.304.555.00	83.6	134.304.555.00	99.09
		3.1.10 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	40.865.400.00	0.00	0	13.542.050.00	33.14	13.542.050.00	33.14	40.076.050.00	98.07
		3.1.11 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	49.306.600.00	0.00	0	15.399.482.00	31.23	26.831.382.00	54.42	40.621.382.00	82.39
		3.1.12 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	38.361.000.00	22.774.400.00	59.37	23.201.400.00	60.48	25.976.400.00	67.72	37.381.400.00	97.45
Total Per Sasaran			211.145.563.985.00	15.386.628.202.00	7.29	90.089.758.590.00	42.67	132.535.210.091.00	62.77	183.525.242.698.00	86.92
Grand Total			211.145.563.985.00	15.386.628.202.00	7.29	90.089.758.590.00	42.67	132.535.210.091.00	62.77	183.525.242.698.00	86.92

**TABEL 2. EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah BKAD	100%	100%	100%	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKAD	83,75 Poin	85,65 %	102,27%	24.615.153.592,00	20.497.478.202,00	83,27%
1		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah - Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	- 100% - 100% - 100%	31.149.000,00	30.985.000,00	99,47%
1)		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	16.044.000,00	15.880.000,00	98,98%
2)		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1.780.000,00	1.780.000,00	100%
3)		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1.780.000,00	1.780.000,00	100%
4)		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2.055.000,00	2.055.000,00	100%
5)		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1.780.000,00	1.780.000,00	100%
6)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	6.980.000,00	6.980.000,00	100%
7)		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	17 Laporan	100%	730.000,00	730.000,00	100,00%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN - Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100%	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- 36 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	- 36 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	- 100% - 100% - 100% - 100%	3.996.937.557,00	3.490.381.980,00	87,33%
8)		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	100%	3.994.692.557,00	3.488.136.980,00	87,32%
9)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	815.000,00	815.000,00	100%
10)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%	615.000,00	615.000,00	100%
11)		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	815.000,00	815.000,00	100%
3		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	2.280.000,00	2.280.000,00	100%
12)		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19 Laporan	19 Laporan	100%	2.280.000,00	2.280.000,00	100%
4		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- 100% - 100%	- 100% - 100%	- 100% - 100%	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 1 Dokumen - 1 Orang	- 1 Dokumen - 1 Orang	- 100% - 100%	7.455.000,00	7.455.000,00	100,00%
13)		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2.455.000,00	2.455.000,00	100,00%
14)		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	100%	100%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	100,00%	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan - Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu - Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	194.307.000,00	192.415.929,00	99,03%
15)		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	5.983.000,00	5.983.000,00	100%
16)		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	58.900.000,00	58.872.000,00	99,95%
17)		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3.960.000,00	3.960.000,00	100%
18)		Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%	1.605.000,00	1.605.000,00	100%
19)		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	123.859.000,00	121.995.929,00	98,50%
6		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	5 Unit	5 Unit	100%	71.000.000,00	69.874.500,00	98,41%
20)		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100%	71.000.000,00	69.874.500,00	98,41%
7		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 100% - 100% - 100%	20.094.496.635,00	16.499.136.484,00	82,11%
21)		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%	4.940.000,00	4.924.500,00	99,69%
22)		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	100%	69.040.000,00	47.516.272,00	68,82%
23)		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100%	20.020.516.635,00	16.446.695.712,00	82,15%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	62 Unit	62 Unit	100%	217.528.400,00	204.949.309,00	94,22%
24)		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	100%	153.300.000,00	140.863.309,00	91,89%
25)		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	100%	26.100.000,00	26.100.000,00	100,00%
26)		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	100%	38.128.400,00	37.986.000,00	99,63%
II		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	100%	100%	100%	- Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu - Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja - Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	185.145.918.193,12	161.759.356.859,00	87,37%
9		Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	100%	100%	- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan - Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	- 2 Dokumen - 2 Dokumen	- 2 Dokumen - 2 Dokumen	- 100% - 100%	1.654.034.300,00	1.389.480.025,00	84,01%
27)		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	175.872.400,00	151.570.400,00	86,18%
28)		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	90.784.000,00	84.230.500,00	92,78%
29)		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	100%	100%	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	647.545.200,00	532.656.832,00	82,26%
30)		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	100%	100%	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	658.991.300,00	559.122.893,00	84,85%
31)		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	40.127.400,00	33.495.400,00	83,47%
32)		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	92 Orang	92 Orang	100%	40.714.000,00	28.404.000,00	69,76%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10		Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100%	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait - Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- 2 Dokumen - 4 Dokumen - 4 Dokumen - 4 Laporan - 4 Dokumen - 51 Orang	- 2 Dokumen - 4 Dokumen - 4 Dokumen - 4 Laporan - 4 Dokumen - 51 Orang	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	642.103.100,00	639.074.008,00	99,53%
33)		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	12.630.000,00	12.630.000,00	100,00%
34)		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	46.173.000,00	45.868.240,00	99,34%
35)		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	397.176.000,00	396.962.967,00	99,95%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
36)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	4 Laporan	4 Laporan	100%	83.479.400,00	82.280.250,00	98,56%
37)		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	99.985.200,00	98.673.051,00	98,69%
38)		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	51 Orang	51 Orang	100%	2.659.500,00	2.659.500,00	100,00%
11		Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	- Jumlah Laporan Keuangan Pemda - Jumlah Perda Realisasi APBD - Jumlah Laporan Keuangan SKPD	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 47 Laporan	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 47 Laporan	- 100% - 100% - 100%	1.138.127.000,00	927.927.064,00	81,53%
39)		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	188 Laporan	188 Laporan	100%	12.951.000,00	10.838.500,00	83,69%
40)		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	36.364.000,00	22.689.000,00	62,39%
41)		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	11 Laporan	11 Laporan	100%	58.625.000,00	31.377.900,00	53,52%
42)		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	97 Laporan	97 Laporan	100%	256.732.000,00	200.317.814,00	78,03%
43)		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	518.344.000,00	457.094.450,00	88,18%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
44)		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	22.114.000,00	15.326.500,00	69,31%
45)		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	14.055.000,00	5.487.000,00	39,04%
46)		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	11.505.000,00	9.218.000,00	80,12%
47)		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	98.357.000,00	91.117.900,00	92,64%
48)		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	59.823.000,00	35.594.000,00	59,50%
49)		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	166 Orang	166 Orang	100%	49.257.000,00	48.866.000,00	99,21%
12		Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	181.532.231.593,12	158.628.275.352,00	87,38%
50)		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	181.532.231.593,12	158.628.275.352,00	87,38%
13		Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	179.422.200,00	174.600.410,00	97,31%
51)		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	179.422.200,00	174.600.410,00	97,31%
III		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal	100%	100%	100%	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang tepat waktu	100 %	100 %	100%	1.384.492.200,00	1.268.407.637,00	91,62%
14		Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda - Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	- 2 Laporan - 2 Dokumen	- 2 Laporan - 2 Dokumen	- 100 % - 100 %	1.384.492.200,00	1.268.407.637,00	91,62%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
52)		Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	100%	100%	100%	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	64.990.200,00	62.419.650,00	96,04%
53)		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	38.361.000,00	37.381.400,00	97,45%
54)		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	86.770.400,00	86.545.400,00	99,74%
55)		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	179.808.600,00	178.517.200,00	99,28%
56)		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	47 Laporan	47 Laporan	100%	97.276.400,00	89.798.850,00	92,31%
57)		Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	70.073.400,00	62.297.450,00	88,90%
58)		Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	475.604.000,00	417.124.400,00	87,70%
59)		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	66.970.200,00	64.375.200,00	96,13%
60)		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	78.933.400,00	54.946.100,00	69,61%
61)		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	47 Laporan	47 Laporan	100%	135.532.600,00	134.304.555,00	99,09%
62)		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	48 Laporan	48 Laporan	100%	40.865.400,00	40.076.050,00	98%
63)		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	66 Orang	66 Orang	100%	49.306.600,00	40.621.382,00	82,39%
Total Pagu											211.145.563.985,12	183.525.242.698,00	86,92%

ANALISIS CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

1. Analisis Capaian Program

Pada Tahun Anggaran 2025, seluruh indikator kinerja Program dapat tercapai sesuai target, bahkan salah satunya dapat melampaui target. Capaian kinerja Program selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerjanya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKAD, target 83,75%, realisasi 85,65%, tingkat capaian kinerja 102,27%.
- 2) Pengelolaan Keuangan Daerah, indikator kinerjanya antara lain :
 - a. Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu, target 100%, realisasi 100%, tingkat capaian kinerja 100%.
 - b. Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja, target 100%, realisasi 100%, tingkat capaian kinerja 100%.
 - c. Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu, target 100%, realisasi 100%, tingkat capaian kinerja 100%.
- 3) Pengelolaan Barang Milik Daerah, indikator kinerjanya adalah :
 - a. Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang tepat waktu, target 100%, realisasi 100%, tingkat capaian kinerja 100%.

2. Analisis Capaian Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2025, seluruh indikator kinerja Kegiatan dapat tercapai sesuai target. Capaian kinerja Kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, target 13 Dokumen realisasi 13 Dokumen, capaian kinerja 100%.
 - b. Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun, target 7 Dokumen realisasi 7 Dokumen, capaian kinerja 100%.
 - c. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 29 Dokumen realisasi 29 Dokumen, capaian kinerja 100%.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, target 36 Orang realisasi 36 Orang, capaian kinerja 100%.

- b. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, target 1 Laporan realisasi 1 Laporan, capaian kinerja 100%.
 - c. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, target 2 Laporan realisasi 2 Laporan, capaian kinerja 100%.
 - d. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen, capaian kinerja 100%.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, target 19 Dokumen realisasi 19 Dokumen, capaian kinerja 100%.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen, capaian kinerja 100%.
 - b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, target 1 Orang realisasi 1 Orang, capaian kinerja 100%.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, target 1 Paket realisasi 1 Paket, capaian kinerja 100%.
 - b. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, target 1 Paket realisasi 1 Paket, capaian kinerja 100%.
 - c. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, target 4 Dokumen realisasi 4 Dokumen, capaian kinerja 100%.
 - d. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, target 1 Laporan realisasi 1 Laporan, capaian kinerja 100%.
 - e. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target 1 Laporan realisasi 1 Laporan, capaian kinerja 100%.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan, target 5 Unit realisasi 5 Unit, capaian kinerja 100%.

- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target 1 Laporan realisasi 1 Laporan, capaian kinerja 100%.
 - b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, target 1 Laporan realisasi 1 Laporan, capaian kinerja 100%.
 - c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, target 1 Laporan realisasi 1 Laporan, capaian kinerja 100%.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara, target 62 Unit realisasi 62 Unit, capaian kinerja 100%.
- 9) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan, target 2 Dokumen realisasi 2 Dokumen, capaian kinerja 100%.
 - b. Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD, target 2 Dokumen realisasi 2 Dokumen, capaian kinerja 100%.
- 10) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, target 2 Dokumen realisasi 2 Dokumen, capaian kinerja 100%.
 - b. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, target 4 Dokumen realisasi 4 Dokumen, capaian kinerja 100%.
 - c. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, target 4 Dokumen realisasi 4 Dokumen, capaian kinerja 100%.
 - d. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), target 4 Laporan realisasi 4 Laporan, capaian kinerja 100%.

- e. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, target 4 Dokumen realisasi 4 Dokumen, capaian kinerja 100%.
 - f. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, target 51 Orang realisasi 51 Orang, capaian kinerja 100%.
- 11) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Laporan Keuangan Pemda, target 1 Laporan realisasi 1 Laporan, capaian kinerja 100%.
 - b. Jumlah Perda Realisasi APBD, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen, capaian kinerja 100%.
 - c. Jumlah Laporan Keuangan SKPD, target 47 Laporan realisasi 47 Laporan, capaian kinerja 100%.
- 12) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, target 1 Laporan realisasi 1 Laporan, capaian kinerja 100%.
- 13) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen, capaian kinerja 100%.
- 14) Pengelolaan Barang Milik Daerah, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda, target 2 Laporan realisasi 2 Laporan, capaian kinerja 100%.
 - b. Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda, target 2 Dokumen realisasi 2 Dokumen, capaian kinerja 100%.

3. Analisis Capaian Sub Kegiatan

Hingga akhir Triwulan IV atau akhir Tahun Anggaran 2025, semua indikator kinerja Sub Kegiatan dapat tercapai sesuai target atau **tidak terdapat deviasi**.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215 Telepon 0721 474828

Whats.App/Hotline 0813 6969 4488

Bandar Lampung, 26 Mei 2025

Nomor : 177 /S/XVIII.BLP/05/2025
Lampiran : Dua berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2024

Kepada Yth.
Bupati Lampung Barat
Di
Liwa

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengelolaan pendapatan retribusi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan risiko kehilangan potensi pendapatan atas pasar yang belum dilakukan pendataan potensi pendapatan secara memadai;
- b. Kekurangan Volume Sebesar Rp2,34 miliar dan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp304,80 juta atas sepuluh paket pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan pada tiga OPD, serta denda keterlambatan belum dikenakan minimal sebesar

Rp478,88 juta atas tiga paket pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran serta potensi kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi; dan

- c. Penyajian dan pengungkapan Investasi Jangka Panjang pada PT Pesagi Mandiri (Perseroda) dan Perumda Air Minum Limau Kunci belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan risiko kehilangan investasi jangka panjang permanen, penurunan nilai investasi jangka panjang permanen dan ketidakpastian struktur modal kepemilikan pada BUMD.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Barat agar memerintahkan, antara lain:

- a. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan untuk:
 - 1) Lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan retribusi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) Menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar supaya:
 - a) Melakukan pendataan potensi pasar yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat sesuai ketentuan sebagai dasar dalam penganggaran pendapatan retribusi;
 - b) Menyusun dan menertibkan tata kelola pasar yang memberikan manfaat optimal untuk pemerintah daerah; dan
 - c) Membuat perjanjian sewa dengan pengguna toko dan ruko pada sepuluh pasar di kabupaten Lampung Barat.
- b. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
 - 1) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1,28 miliar kepada penyedia jasa sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
 - 2) Memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1,36 miliar sesuai ketentuan kepada penyedia jasa konstruksi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan memperhitungkan sisa pembayaran atas pekerjaan atau menyetorkan ke Kas Daerah; dan
 - 3) Memproses kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan yang belum dikenakan atas penyelesaian pekerjaan pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan minimal sebesar Rp478,88 juta sesuai ketentuan dengan menyetorkan ke Kas Daerah.
- c. Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bagian Perekonomian untuk:
 - 1) Memproses perbaikan dokumen pendirian PT Pesagi Mandiri (Perseroda) dalam rangka perbaikan nilai modal ditempatkan yang dicantumkan pada dokumen pendirian;
 - 2) Memproses perbaikan pencatatan nilai Piutang a.n. PBJ yang telah dihapusbukukan pada PT Pesagi Mandiri (Perseroda); dan
 - 3) Menelusuri dokumen hibah kepada Perumda Air Minum Limau Kunci dalam rangka menginventarisasi struktur modal Perumda Air Minum Limau Kunci.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 24A/LHP/XVIII.BLP/05/2025 dan Nomor 24B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 masing-masing tertanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lampung Barat, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Kepala BPK Perwakilan, *ty*



Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., Ak., CA, CSFA, ACPA
NIP 197304251997031004

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 24B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 23 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Lampung

Petanggung Jawab Pemeriksaan,



Puspitaningtyas, S.E., M.S.E., M.Ec., Ak., CA.
Register Negara Akuntan No. RNA-12650

DOKUMENTASI KEGIATAN BKAD KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025



bkadlambar

Audio unavailable



Liked by **santyetyka** and others

bkadlambar Bupati Lampung Barat Bapak H. Parosil Mabsus menyerahkan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 Kepada BPK RI Provinsi Lampung. (Kamis, 27/03/2025) less

March 29, 2025



bkadlambar

Audio unavailable



Liked by **santyetyka** and others

bkadlambar Bupati Lampung Barat Bapak H. Parosil Mabsus menyerahkan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 Kepada BPK RI Provinsi Lampung. (Kamis, 27/03/2025) less

March 29, 2025



bkadlambar

Audio unavailable



Liked by **santyetyka** and others

bkadlambar Bupati Lampung Barat Bapak H. Parosil Mabsus menyerahkan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 Kepada BPK RI Provinsi Lampung. (Kamis, 27/03/2025) less

March 29, 2025



bkadlambar



Liked by rizazulpa and others

bkadlambar Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat menghadiri acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Lampung Barat, yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Lampung Barat dan dihadiri seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Barat.

Pada acara tersebut, Kepala BKAD menyampaikan pemaparan yang mengambil tema Kemampuan Fiskal Daerah.



Liked by rizazulpa and others

bkadlambar Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat menghadiri acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Lampung Barat, yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Lampung Barat dan dihadiri seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Barat.

Pada acara tersebut, Kepala BKAD menyampaikan pemaparan yang mengambil tema Kemampuan Fiskal Daerah.

Acara Forum Konsultasi Publik ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik oleh Kepala BKAD, Kepala Bappeda, Kepala BPS, dan perwakilan beberapa Perangkat Daerah. less

February 10, 2025



bkadlambar



11



Liked by **parida.ida16** and others

bkadlambar Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Bapak Sumadi,S.IP.,M.M. didampingi oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Ibu Dwi Deasy,S.E.,M.M. melakukan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester I dengan Pihak KPPN Lampung Barat less

August 1, 2025



bkadlamar

Mezzosound • Motivational Inspiration



Liked by **parida.ida16** and others

bkadlamar Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
PertanggungJawaban OPD Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 less

September 3, 2025



bkadlamar

Mezzosound • Motivational Inspiration



Liked by **parida.ida16** and others

bkadlamar Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
PertanggungJawaban OPD Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 less

September 3, 2025



bkadlambar



Liked by **santyyetyka** and others

bkadlambar Sosialisasi dan Pelatihan Core Tax Administration System (Coretax) 2025.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotabumi bekerja sama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Coretax kepada Bendahara Instansi Pemerintah di lingkungan Kabupaten Lampung Barat di Ruang Rapat BKAD Kabupaten Lampung Barat (Selasa, 4/2).



Rekonsiliasi Penyusunan Laporan BMD